

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pruwatan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperbaiki. Pertama, dari segi komunikasi, proses penyampaian kebijakan dilakukan dengan baik melalui Musyawarah Desa (MUSDES) dan pertemuan lanjutan. Komunikasi yang jelas dan terbuka antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, termasuk bidan desa, kader kesehatan, dan masyarakat, memungkinkan para pelaksana memahami dengan baik peran mereka dalam implementasi kebijakan. Hal ini memperlancar jalannya program penanggulangan stunting. Kedua, dari aspek disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, para pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi meskipun ada kendala seperti anggaran terbatas dan tanggung jawab rumah tangga lainnya. Kerjasama antar pelaksana kebijakan juga terjalin dengan solid, dan mereka melaksanakan program dengan kejujuran dan konsistensi. Hal ini menciptakan suasana yang kondusif bagi implementasi kebijakan yang sukses. Namun, dalam hal struktur birokrasi, meskipun tidak ada struktur organisasi formal yang khusus menangani kebijakan penanggulangan stunting, pembagian kerja sudah cukup jelas dan berjalan efektif. Meskipun tanpa adanya prosedur formal yang mendetail, pelaksana kebijakan tetap bekerja secara koordinatif, terutama dengan adanya dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menampung aspirasi masyarakat. Di sisi lain, terdapat kekurangan dalam hal standar prosedur, terutama terkait dengan deteksi dan intervensi terhadap stunting, yang perlu diperjelas untuk memastikan kebijakan ini dapat lebih tepat sasaran. Terakhir, pencatatan keuangan yang transparan dengan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskudes) memberikan gambaran yang baik tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.